

MODERASI BERAGAMA DALAM KERAGAMAN INDONESIA

RELIGIOUS MODERATION IN INDONESIA'S DIVERSITY

Agus Akhmadi

Balai Diklat Keagamaan Surabaya
agusakhmadi63@gmail.com

ABSTRACT

The Indonesian is multicultural country. It's diversity includes differences in culture, religion, race, language, ethnicity, tradition and others. In a such multicultural society, there are frequent tensions and conflicts among cultural groups and have impacts on harmony in life. The purpose of this paper is to discuss the diversity of Indonesian culture, its religious moderation in the diversity and role of religious educators in realizing Indonesian national peace. The method used is a library research. The conclusion of this study is that multicultural life requires multicultural understanding and awareness that respects diversity, and willingness to interact with anyone fairly. A religious attitude of moderation is needed in the form of recognition of the existence of other parties, being tolerant, respecting differences of opinion and not forcing the will through violence. The role of the government, community leaders, and religious guidance is needed to socialize, develop religious moderation to the community for the sake of the realization of harmony and peace.

Keywords : Multicultural, Religious moderation, Religious guidance.

ABSTRAK

Bangsa Indonesia adalah masyarakat beragam budaya dengan sifat kemajemukannya. Keragaman mencakup perbedaan budaya, agama, ras, bahasa, suku, tradisi dan sebagainya. Dalam masyarakat multibudaya yang demikian, sering terjadi ketegangan dan konflik antar kelompok budaya dan berdampak pada keharmonisan hidup. Tujuan penulisan ini adalah membahas keragaman budaya bangsa Indonesia, moderasi beragama dalam keragaman dan peran penyuluh agama dalam mewujudkan kedamaian bangsa Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka. Kesimpulan kajian ini adalah bahwa dalam kehidupan multikultural diperlukan pemahaman dan kesadaran multibudaya yang menghargai perbedaan, kemajemukan dan kemauan berinteraksi dengan siapapun secara adil. Diperlukan sikap moderasi beragama berupa pengakuan atas keberadaan pihak lain, memiliki sikap toleran, penghormatan atas perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan. Diperlukan peran pemerintah, tokoh masyarakat, dan para penyuluh agama untuk mensosialisasikan, menumbuhkembangkan moderasi beragama kepada masyarakat demi terwujudnya keharmonisan dan kedamaian.

Kata Kunci : Multikultural, Moderasi beragama, Penyuluh agama.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki keragaman, mencakup beraneka ragam etnis, bahasa, agama, budaya, dan status sosial. Keragaman dapat menjadi "*integrating force*" yang mengikat kemasyarakatan namun dapat menjadi penyebab terjadinya benturan antar budaya, antar ras, etnik, agama dan antar nilai-nilai hidup.

Keragaman budaya (multikultural) merupakan peristiwa alami karena bertemunya berbagai budaya, berinteraksinya beragam

individu dan kelompok dengan membawa perilaku budaya, memiliki cara hidup berlainan dan spesifik. Keragaman seperti keragaman budaya, latar belakang keluarga, agama, dan etnis tersebut saling berinteraksi dalam komunitas masyarakat Indonesia.

Dalam komunikasi horizontal antar masyarakat, Mulyana menyebut, benturan antar suku masih berlangsung di berbagai wilayah, mulai dari sekedar stereotip dan prasangka antar suku, diskriminasi, hingga ke konflik terbuka dan pembantaian antar suku yang memakan korban jiwa (Mulyana, 2008). Persaingan antar suku

tidak hanya di kalangan masyarakat tetapi juga dikalangan elit politik bahkan akademisi untuk menempati jabatan di berbagai instansi.

Dalam masyarakat multikultural, interaksi sesama manusia cukup tinggi intensitasnya, sehingga kemampuan sosial warga masyarakat dalam berinteraksi antar manusia perlu dimiliki setiap anggota masyarakat. Kemampuan tersebut menurut Curtis, mencakup tiga wilayah, yaitu : *affiliation* (kerja sama), *cooperation and resolution conflict* (kerjasama dan penyelesaian konflik), *kindness, care and affection/ emphatic skill* (keramahan, perhatian, dan kasih sayang). (Curtis, 1988).

Keragaman suku, ras, agama, perbedaan bahasa dan nilai-nilai hidup yang terjadi di Indonesia sering berbuntut berbagai konflik. Konflik di masyarakat yang bersumber pada kekerasan antar kelompok yang meledak secara sporadis di berbagai kawasan di Indonesia menunjukkan betapa rentannya rasa kebersamaan yang dibangun dalam Negara-Bangsa Indonesia, betapa kentalnya prasangka antara kelompok dan betapa rendahnya saling pengertian antar kelompok.

Konflik berbasis kekerasan di Indonesia seringkali berakhir menjadi bencana kemanusiaan yang cenderung berkembang dan meluas baik dari jenis maupun pelakunya. Hal ini yang menjadikan proses penanganan konflik membutuhkan waktu lama dengan kerugian sosial, ekonomi, dan politik yang luar biasa. Berdasarkan masalah-masalah yang datang silih berganti ini, Indonesia bisa masuk dalam situasi darurat kompleks.

Konflik dan kekerasan sudah masuk dalam berbagai lingkungan masyarakat. Faktor pemicu tindak-tindak kekerasan yang selama ini terjadi seringkali merupakan muara terjadinya konflik yang tertangani secara keliru. Konflik merupakan penyebab bagi kekerasan, karena dibalik setiap bentuk kekerasan terdapat konflik yang belum

terselesaikan. Konflik telah mencapai titik kekerasan dapat dipastikan karena konflik telah tertangani secara keliru atau konflik telah diabaikan (Sutanto, 2005).

Budaya kekerasan berfokus pada anggapan bahwa konflik sebagai perusak atau penghancur. Konflik dipandang sebagai pergulatan yang baik dan jahat, hitam dan putih, kemenangan dan kekalahan, keuntungan dan kerugian. Konflik dapat dianggap sebagai penyebab niscaya bagi kekerasan, jika keberadaannya dipersepsikan negatif dan diselesaikan dengan cara kompetitif. Oleh karena itu perlu diusahakan agar konflik ditangani lebih serius untuk menciptakan ke damaian di masyarakat.

Dalam kontek kemasya-rakatan, pengendalian terhadap perilaku konflik ada yang dilakukan secara

Kesadaran dan pemahaman tentang keragaman budaya (multi-kultural) khususnya keragaman beragama semakin dibutuhkan masyarakat. Penyuluh agama sebagai pelayan public selayaknya memiliki kompetensi dan melakukan gerakan moderasi untuk meningkatkan kedamaian umat.

ketat tetapi ada pula yang mengembangkan pendekatan edukatif. Sebagai contoh, dalam dunia pendidikan terdapat tiga pendekatan edukatif yang umum diterapkan untuk mengatasi konflik pelajar, yaitu : [1] pendidikan damai yang diintegrasikan dengan kurikulum sekolah, [2] latihan penyelesaian konflik secara konstruktif, dan [3] mediasi dan negosiasi oleh teman sebaya (Gerstein &

Moeschberger, 2003). Model penyelesaian konflik tersebut efektif, di antaranya dapat meningkatkan pengetahuan pelajar dalam menyelesaikan konflik secara konstruktif, lebih bersikap prososial, dan dapat menghindari sebagai korban dari tindak kekerasan (Laurson, Finkelstein, Betts, 2001).

Bagi para penyuluh agama sebagai pelayan publik, maka fenomena keragaman budaya mengharuskan para penyuluh memahami pengetahuan dan kesadaran multikultural, sehingga memiliki kompetensi dalam menghadapi perbedaan, sekecil apapun perbedaan kelompok binaannya. Penyuluh perlu meningkatkan persepsi mereka, mencukupkan diri dengan pengetahuan tentang keragaman budaya, memahami adanya

bentuk-bentuk diskriminasi, stereotip dan rasisme yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat multikultural, para penyuluh diharapkan dapat menjadi fasilitator perubahan dan ahli dalam mengatasi konflik dan melakukan konsultasi kepada pihak-pihak yang terkait untuk meningkatkan keharmonisan kelompok binaannya.

Dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan publik terhadap beragam kelompok masyarakat, maka penyuluh dihadapkan dengan jangkauan layanan yang lebih luas, sehingga perlu memahami multikultural sehingga dapat lebih efektif dalam pelayanan publik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus kajian artikel ini adalah kesadaran dan pemahaman tentang keragaman budaya, moderasi beragama dan peran yang dimainkan para penyuluh agama untuk membangun keharmonisan beragama pada masyarakat Indonesia yang multikultur.

B. Permasalahan

Fokus kajian ini adalah tentang keragaman budaya bangsa Indonesia, bagaimana moderasi beragama dalam keragaman bangsa Indonesia dan bagaimana peran penyuluh agama dalam mewujudkan keharmonisan hidup bangsa Indonesia.

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah memahami keragaman budaya pada bangsa Indonesia, bagaimana moderasi dalam keragaman bangsa Indonesia dan bagaimana peran penyuluh agama dalam keragaman bangsa Indonesia.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan adalah tersedianya kajian tentang keragaman budaya bangsa Indonesia, sikap moderasi dalam keragaman bangsa Indonesia dan peran penyuluh agama dalam kehidupan keragaman Indonesia.

KAJIAN TEORI

A. Multikultural (Keragaman) bangsa Indonesia

Indonesia dengan keanekaragaman budaya, agama, suku, bahasa yang dimilikinya menunjukkan sebagai salah satu bangsa yang memiliki masyarakat multikultural. Keanekaragaman menjadi rahmat tersendiri jika dikelola dengan baik, menjadi keunikan dan kekuatan, namun pluralitas demikian dapat menjadi tantangan jika tidak disikapi dengan bijak dan arif, dapat menjadi ancaman perpecahan dan perseteruan yang dapat mengoyak keamanan sosial.

Keragaman budaya merupakan peristiwa alami karena bertemunya berbagai perbedaan budaya di suatu tempat, setiap individu dan kelompok suku bertemu dengan membawa perilaku budaya masing-masing, memiliki cara yang khas dalam hidupnya. Konsep multibudaya berbeda dengan konsep lintas budaya sebagaimana pengalaman bangsa Amerika yang beragam budaya karena hadirnya beragam budaya dan berkumpul dalam suatu negara. Dalam konsep multibudaya perbedaan individu meliputi cakupan makna yang luas, sementara dalam konsep lintas budaya perbedaan etnis yang menjadi fokus perhatian.

Multikulturalisme secara kebahasaan dapat dipahami dengan paham banyak kebudayaan. Kebudayaan dalam pengertian sebagai ideologi dan sekaligus sebagai alat menuju derajat kemanusiaan tertinggi. Maka untuk itu penting melihat kebudayaan secara fungsional dan secara operasional dalam pranata-pranata sosial.

Secara istilah dikenal multikulturalisme deskriptif dan multikulturalisme normatif. Multikulturalisme deskriptif adalah kenyataan sosial yang mencerminkan adanya kemajemukan (pluralistik). Sedangkan multikulturalisme normatif berkaitan dengan dasar-dasar moral, yaitu adanya ikatan moral dari para warga dalam lingkup negara/ bangsa untuk melakukan sesuatu yang menjadi kesepakatan bersama (Nugraha, 2008), dan multikulturalisme normatif itulah tampaknya yang kini dikembangkan di Indonesia.

Muzhar dalam Darlis, 2017, memandang

multikulturalisme mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikapan dan tindakan, oleh masyarakat suatu negara, yang majemuk dari segi etnis, budaya, agama dan sebagainya, namun mempunyai cita-cita untuk mengembangkan semangat kebangsaan yang sama dan mempunyai kebanggaan untuk mempertahankan kemajemukan tersebut.

Konsep multikulturalisme tidak asing di dunia Islam, setidaknya memiliki pengalaman historis yang menguatkan bahwa Islam menghargai keragaman, sebagaimana dipraktikkan Rasul dalam pemerintahan Madinah.

Multikulturalisme memiliki relevansi dengan ajaran Islam antara lain dalam toleransi, perdamaian dan keadilan. a] Toleransi, sebagaimana Al-Qur'an Surat Al Hujuraat : 13 yang menegaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan bermacam-macam suku bangsa agar manusia saling mengenal. Bahwa perbedaan tidak boleh menjadi ajang konflik, karenanya harus dihargai. Dengan saling mengenal maka jalan menuju kehidupan multikultural akan terbuka. b] Perdamaian. Islam berasal dari akar kata "*al-Salam*" yang berarti perdamaian. Islam mengajak umatnya untuk melakukan dan menyebarkan perdamaian di muka bumi. Dalam QS al-Baqarah [2] : 208, "*Udkhulu fi al-silmi kaffah*" - yang selama ini sering diterjemahkan "masuklah ke dalam agama Islam secara kaffah"- jika menggunakan konsep multikultural ada yang melakukan reorientasi pemahaman yang mendekati konsep multikulturalisme yaitu dengan menyatakannya sebagai kebersediaan untuk masuk ke dalam perdamaian secara *kaffah* (total). Makna ini berbeda dengan makna secara literer yang menegaskan perbedaan secara sepihak, dan menafikan keberadaan entitas lain dalam kehidupan. c] Keadilan. Multikultural menekankan berlaku adil dalam memandang dan bersikap terhadap orang atau kelompok lain. Al-Qur'an (Surat al-Maidah [5] : 8) "*Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil*". Ayat ini mengajak untuk berlaku adil sekalipun terhadap orang atau kelompok yang memusuhi kita. Berlaku adil maksudnya hendak-

lah kita tetap berlaku "obyektif" terhadap mereka. Jika prinsip ini menjadi ruh kehidupan kita, maka kehidupan multi-kultural akan dapat terwujud.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang pluralistik dan memiliki dua modalitas penting yang membentuk karakternya yang multikultural, yaitu demokrasi dan kearifan lokal (*local wisdom*) sebagai nilai yang dipercaya dan dipahami dapat menjaga kerukunan umat beragama.

Dalam keragaman bangsa Indonesia, secara historis dan sosiologis agama Islam dianut mayoritas bangsa Indonesia, namun jika dilihat tingkat provinsi atau daerah, misalnya kabupaten/kota maka terdapat agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghuchu yang menjadi mayoritas di lingkungan tersebut.

Fakta dan data keragaman agama-agama di Indonesia menunjukkan bahwa keragaman agama ini merupakan mozaik yang memperkaya khazanah kehidupan keagamaan di Indonesia, namun di sisi lain keragaman agama juga mengandung potensi ancaman bagi persatuan Negara Republik Indonesia. Disinilah diperlukan keterlibatan seluruh warga masyarakat dalam mewujudkan kedamaian.

Tugas untuk menyadarkan masyarakat tentang multikultural ini tidaklah mudah, bahkan membangun kesadaran kalangan masyarakat bahwa kebhinekaan adalah sebuah keniscayaan sejarah. Menanamkan sikap yang adil dalam menyikapi kebhinekaan adalah perkara yang lebih sulit, karena, penyikapan terhadap kebhinekaan kerap berimpitan dengan pelbagai kepentingan sosial, ekonomi, dan politik.

Indonesia sebagai sebuah Negara multikultural dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia dan memiliki keragaman etnik, budaya, bahasa, dan agama juga menjadi masalah untuk terwujudnya keharmonisan dan kenyamanan beragama, oleh karena itu, disamping bekerja sama dengan para ahli yang mempunyai perhatian terhadap masalah multikultural, para penyuluh agama sebaiknya juga mulai memikirkan untuk memberikan

informasi mengenai multikulturalisme kepada berbagai lembaga, badan, dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama membangun kesadaran multi-kultural.

B. Moderasi dalam keragaman Indonesia

Dalam masyarakat Indonesia yang multibudaya, sikap keberagaman yang eksklusif yang hanya mengakui kebenaran dan keselamatan secara sepihak, tentu dapat menimbulkan gesekan antar kelompok agama.

Konflik keagamaan yang banyak terjadi di Indonesia, umumnya dipicu adanya sikap keberagaman yang eksklusif, serta adanya kontestasi antar kelompok agama dalam meraih dukungan umat yang tidak dilandasi sikap toleran, karena masing-masing menggunakan kekuatannya untuk menang sehingga memicu konflik.

Konflik kemasyarakatan dan pemicu disharmoni masyarakat yang pernah terjadi dimasa lalu berasal dari kelompok ekstrim kiri (komunisme) dan ekstrim kanan (Islamisme). Namun sekarang ini ancaman disharmoni dan ancaman negara kadang berasal dari globalisasi dan Islamisme, yang oleh Yudi (2014 : 251) disebutnya sebagai dua fundamentalisme : pasar dan agama.

Dalam konteks fundamentalisme agama, maka untuk menghindari disharmoni perlu ditumbuhkan cara beragama yang moderat, atau cara ber-Islam yang inklusif atau sikap beragama yang terbuka, yang disebut sikap moderasi beragama. Moderasi itu artinya moderat, lawan dari ekstrem, atau berlebihan dalam menyikapi perbedaan dan keragaman.

Kata moderat dalam bahasa Arab dikenal dengan *al-wasathiyah* sebagaimana terekam dari QS.al-Baqarah [2] : 143. Kata *al-Wasath* bermakana terbaik dan paling sempurna. Dalam hadis yang juga disebutkan bahwa sebaik-baik persoalan adalah yang berada di tengah-tengah.

Dalam melihat dan menyelesaikan satu persoalan, Islam moderat mencoba melakukan pendekatan kompromi dan berada di tengah-

tengah, dalam menyikapi sebuah perbedaan, baik perbedaan agama ataupun mazhab, Islam moderat mengedepankan sikap toleransi, saling menghargai, dengan tetap meyakini kebenaran keyakinan masing-masing agama dan mazhab, sehingga semua dapat menerima keputusan dengan kepala dingin, tanpa harus terlibat dalam aksi yang anarkis. (Darlis, 2017)

Dengan demikian moderasi beragama merupakan sebuah jalan tengah di tengah keberagaman agama di Indonesia. Moderasi merupakan budaya Nusantara yang berjalan seiring, dan tidak saling menegasikan antara agama dan kearifan lokal (*local wisdom*). Tidak saling mempertentangkan namun mencari penyelesaian dengan toleran.

Dalam konteks beragama, memahami teks agama saat ini terjadi kecenderungan terpolarisasinya pemeluk agama dalam dua kutub ekstrem. Satu kutub terlalu mendewakan teks tanpa menghiraukan sama sekali kemampuan akal/nalar. Teks Kitab Suci dipahami lalu kemudian diamalkan tanpa memahami konteks. Beberapa kalangan menyebut kutub ini sebagai golongan konservatif. Kutub ekstrem yang lain, sebaliknya, yang sering disebut kelompok liberal, terlalu mendewakan akal pikiran sehingga mengabaikan teks itu sendiri.

Jadi terlalu liberal dalam memahami nilai-nilai ajaran agama juga sama ekstremnya.

Moderat dalam pemikiran Islam adalah mengedepankan sikap toleran dalam perbedaan. Keterbukaan menerima keberagaman (inklusivisme). Baik beragama dalam mazhab maupun beragama dalam beragama. Perbedaan tidak menghalangi untuk menjalin kerja sama, dengan asas kemanusiaan (Darlis, 2017). Meyakini agama Islam yang paling benar, tidak berarti harus melecehkan agama orang lain. Sehingga akan terjadilah persaudaraan dan persatuan antar agama, sebagaimana yang pernah terjadi di Madinah di bawah komando Rasulullah SAW.

Moderasi harus dipahami ditumbuhkembangkan sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna, di mana setiap warga masyarakat, apapun

suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya mau saling mendengarkan satu sama lain serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka.

Untuk mewujudkan moderasi tentu harus dihindari sikap inklusif. Menurut Shihab bahwa konsep Islam inklusif adalah tidak hanya sebatas pengakuan akan kemajemukan masyarakat, tapi juga harus diaktualisasikan dalam bentuk keterlibatan aktif terhadap kenyataan tersebut. Sikap inklusivisme yang dipahami dalam pemikiran Islam adalah memberikan ruang bagi keragaman pemikiran, pemahaman dan persepsi keislaman.

Dalam pemahaman ini, kebenaran tidak hanya terdapat dalam satu kelompok saja, melainkan juga ada pada kelompok yang lain, termasuk kelompok agama sekalipun. Pemahaman ini berangkat dari sebuah keyakinan bahwa pada dasarnya semua agama membawa ajaran keselamatan. Perbedaan dari satu agama yang dibawah seorang nabi dari generasi ke generasi hanyalah syariat saja (Shihab, 1999).

Jadi jelas bahwa moderasi beragama sangat erat terkait dengan menjaga kebersamaan dengan memiliki sikap 'tenggang rasa', sebuah warisan leluhur yang mengajarkan kita untuk saling memahami satu sama lain yang berbeda dengan kita.

Seruan untuk selalu menggaungkan moderasi, mengambil jalan tengah, melalui perkataan dan tindakan bukan hanya menjadi kepedulian para pelayan publik seperti penyuluh agama, atau warga Kementerian agama namun seluruh warga negara Indonesia saja dan seluruh umat manusia, sehingga tidak sampai menimbulkan peristiwa sebagai penembakan di masjid Selandia Baru yang menewaskan 50 jamaah salat jum'at.

Berbagai konflik dan ketegangan antar umat manusia dalam keragaman agama, suku, faham dan sebagainya telah memunculkan ketetapan internasional lewat Perserikatan Bangsa Bangsa yang menetapkan tahun 2019 ini sebagai "Tahun Moderasi Internasional" (*The International Year of Moderation*). Penetapan ini jelas sangat relevan dengan komitmen Kementerian

Agama untuk terus menggaungkan moderasi beragama.

Agama menjadi pedoman hidup dan solusi jalan tengah (*the middle path*) yang adil dalam menghadapi masalah hidup dan kemasyarakatan, agama menjadi cara pandang dan pedoman yang seimbang antara urusan dunia dan akhirat, akal dan hati, rasio dan norma, idealisme dan fakta, individu dan masyarakat. Hal sesuai dengan tujuan agama diturunkan ke dunia ini agar menjadi tuntunan hidup, agama diturunkan ke bumi untuk menjawab berbagai persoalan dunia, baik dalam skala mikro maupun makro, keluarga (privat) maupun negara (publik).

C. Peran penyuluh agama

Penyuluh agama merupakan salah satu jabatan fungsional di Kementerian Agama Republik Indonesia. Penyuluh Agama adalah ujung tombak pemerintah dalam menyampaikan pesan-pesan agama maupun pesan-pesan program pemerintah.

Peran penyuluh agama dalam masyarakat sangat penting karena sebagian masyarakat masih memandang pentingnya sosok ideal sebagai figur atau patron dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu penyuluh agama memiliki potensi untuk didudukkan sebagai figur atau tokoh agama di masyarakat.

Menurut teori strukturisasi, eksistensi penyuluh agama dapat dilihat sebagai agen yang dapat membentuk struktur dalam masyarakat. Aktifitas para penyuluh agama melalui praktik atau tindakan yang berulang-ulang akan menjadi contoh atau sebagai aktor. Penyuluh agama sebagai agen akan mengembangkan kebiasaan sehari-hari yang tak hanya memberikan perasaan aman kepada aktor, tetapi juga memungkinkan mereka menghadapi kehidupan sosial mereka secara efisien.

Untuk menumbuhkan motivasi dan melakukan tindakan-tindakan membangun kesadaran dan sikap moderasi beragama tersebut, penyuluh agama diharapkan berfungsi sebagai : 1] informatif dan edukatif; penyuluh agama memosisikan sebagai juru dakwah yang

berkewajiban mendakwahkan ajaran agamanya, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai ajaran agama 2] Fungsi Konsultatif : penyuluh agama menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara pribadi, keluarga maupun sebagai masyarakat umum. 3] Fungsi administratif: penyuluh agama memiliki tugas untuk merencanakan, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan yang telah dilakukannya (Amirulloh, 2016).

Untuk menjalankan fungsi penyuluh agama secara optimal, maka dalam naskah akademik (Kementerian Agama RI, 2015) disebutkan pokok-pokok kemampuan yang diperlukan, yaitu : 1] Kemampuan untuk mengidentifikasi dan memonitor variabel-variabel dan isu-isu penting bagi vitalitas masyarakat (sebagaimana fungsi tersebut dilakukan misalnya isu demografis, ekonomi, pelayanan manusia, lingkungan dan lain-lain) dan kemampuan untuk menggunakan dan menerapkan variabel-variabel dalam memprioritaskan program, perencanaan dan penyerahan atau disebut Proses aksi sosial 2] kesadaran, komitmen dan kemampuan termasuk rasa memiliki terhadap berbagai budaya yang berbeda, asumsi-asumsi, norma-norma, kepercayaan dan nilai-nilai multi-budaya, atau Keanekaragaman budaya. 3] Kemampuan merencanakan, mendesain, penerapan, mengevaluasi, menghitung dan menjual program penyuluhan untuk memperbaiki mutu hidup sasaran penyuluhan atau Pemograman bidang penyuluhan. 4] Kemampuan untuk mengenali, memahami, memudahkan peluang dan sumber daya yang diperlukan sebagai respon terbaik terhadap kebutuhan dari individu dan masyarakat binaan (Perikatan). 5] Menguasai keterampilan berkomunikasi baik lisan dan tulisan, penerapan teknologi dan metode-metode penyuluhan untuk mendukung program-program penyuluhan dalam memandu perubahan perilaku kelompok sasaran penyuluhan (Penyampaian pendidikan dan informasi). 6] Kemampuan interaksi yang efektif dengan individu dan kelompok

binaan yang beragam untuk mewujudkan kerjasama, membangun jaringan dan sistem dinamis (Hubungan antara pribadi). 7] Pemahaman sejarah, filsafat dan karakteristik dari penyuluhan (Pengetahuan tentang organisasi) 8] Kemampuan untuk mempengaruhi individu dan kelompok-kelompok binaan yang berbeda secara positif, atau pengelolaan organisasi penyuluh 9] kemampuan untuk menetapkan struktur, mengorganisir proses, pengembangan, dan memonitor sumber daya serta memimpin perubahan untuk memperoleh hasil-hasil penyuluhan secara efektif dan efisien atau fungsi kepemimpinan. 10] Kemampuan berperagaan perilaku yang mencerminkan tingginya tingkat dari kinerja penyuluh, mencerminkan etika kerja yang kuat, komitmen untuk pendidikan berkesinambungan sesuai visi, misi dan sasaran penyuluhan dalam rangka meningkatkan efektifitas individu dan organisasi (Profesionalisme).

Menurut Fahrudin, 2019, dalam upaya mewujudkan keharmonisan hidup berbangsa dan beragama, maka membutuhkan moderasi beragama, yaitu sikap beragama yang sedang atau di tengah-tengah dan tidak berlebihan. Tidak mengklaim diri atau kelompoknya yang paling benar, tidak menggunakan legitimasi teologis yang ekstrem, tidak menggunakan paksaan apalagi kekerasan, dan netral dan tidak berafiliasi dengan kepentingan politik atau kekuatan tertentu. Sikap moderasi tersebut perlu disosialisasikan, dididikkan, ditumbuh-kembangkan dengan suri teladan para penyuluh agama.

Para penyuluh dapat memposisikan diri ikut ambil bagian dalam moderasi beragama, yang menghadirkan kedamaian beragama pada setiap kegiatan penyuluhannya. Bangunan masyarakat yang toleran, damai perlu dioptimalkan oleh para penyuluh melalui kegiatan atau tahapan : melakukan perencanaan kegiatan, mengorganisir kegiatan, melaksanakan kegiatan serta melakukan monitoring untuk evaluasi program moderasi beragama.

PEMBAHASAN

Bangsa Indonesia sudah terkenal dengan

keragaman budaya dan dengan sifat kemajemukannya. Kemajemukan bangsa Indonesia tampak dari keragaman budaya, agama, ras, bahasa, suku, tradisi dan sebagainya sehingga berpredikat sebagai bangsa yang multikultural.

Masyarakat multikultural terdiri dari masyarakat negara, bangsa, daerah, atau lokasi geografis seperti kota atau kampung, yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Masyarakat multikultural tidak bersifat homogen, namun memiliki karakteristik heterogen di mana pola hubungan sosial antar individu di masyarakat bersifat toleran dan menerima kenyataan untuk hidup berdampingan secara damai satu sama lain dengan perbedaan yang ada pada tiap entitas budayanya.

Fenomena kehidupan damai dan harmonis tersebut ternyata tidak selalu terjadi di Indonesia, masyarakat multikultural di Indonesia tidak selamanya dapat hidup berdampingan sebagaimana yang diharapkan. Ketegangan dan konflik sering muncul pada masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman kultur, agama, bahasa, ras dan tradisi yang berbeda, yang pada saat tertentu multikultur tersebut menjadi persoalan besar bagi keharmonisan bahkan kelangsungan bangsa. Oleh karena itu, perlu perjuangan terus menerus untuk mewujudkannya.

Berbagai tragedi ketidakharmonisan masyarakat multibudaya yang pernah terjadi di Indonesia dapat terjadi akibat dari minimnya kesadaran multibudaya, rendahnya moderasi beragama, serta kekurangarifan dalam mengelola keberagaman masyarakat, yang menyebabkan terjadinya gesekan horizontal yang berujung pada perpecahan, yang semuanya menjadi pengalaman pahit bangsa Indonesia.

Dalam upaya mengantisipasi terjadinya ketegangan dan konflik di tengah masyarakat, maka perlu pendekatan kultural dengan mem-perkuat falsafah lokal atau kearifan lokal yang memiliki pesan-pesan luhur tentang kedamaian. Namun, solusi dengan pendekatan tersebut juga tidak selalu berhasil digunakan tanpa dibarengi dengan paham keagamaan yang tepat dan bijak, karena masyarakat Indonesia

adalah masyarakat beragama. Peran-pesan agama menjadi sesuatu yang mendasar menjadi pijakan masyarakat dalam bertingkah laku.

Sebagai masyarakat yang fanatik dengan keyakinannya, maka pendekatan keagamaan menjadi pilihan untuk membangun keharmonisan umat. Pendekatan yang dipilih tentunya sikap beragama yang damai, yang sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia yang multikultural. Dengan pendekatan ini, moderasi beragama yang ramah, toleran, terbuka, fleksibel dapat menjadi jawaban terhadap kekhawatiran konflik yang marak terjadi di tengah masyarakat multikultural.

Moderasi beragama tidak berarti bahwa mencampuradukkan kebenaran dan menghilangkan jati diri masing-masing. Sikap moderasi tidak menistakan kebenaran, kita tetap memiliki sikap yang jelas dalam suatu persoalan, tentang kebenaran, tentang hukum suatu masalah, namun dalam moderasi beragama, kita lebih pada sikap keterbukaan menerima bahwa diluar diri kita ada saudara sebangsa yang juga memiliki hak yang sama dengan kita sebagai masyarakat yang berdaulat dalam bingkai kebangsaan. Masing-masing orang memiliki keyakinan di luar keyakinan atau agama yang mesti kita hormati dan akui keberadaannya, untuk itu kita perlu terus menerus bertindak dan beragama dengan cara moderat.

Moderasi dalam Islam telah dicontohkan oleh para pendahulu kita, mulai dari Nabi kita, sahabat, para ulama termasuk ulama-ulama kita adalah berlaku adil atas sesama tanpa harus melihat latarbelakang agama, ras, suku dan bahasa.

Dalam lingkup masing-masing agama, juga terdapat keragaman faham agama. Schwartz, 2007 menyebutkan adanya dua wajah yang merupakan manifestasi sosio-kultural ajaran Islam yang tidak bisa dilepas dari pola epistemologis yang dilaluinya yang berbeda secara socio—kultural, *pertama*, wajah Islam yang ramah, bersahabat, toleran, dan inklusif yang siap berdampingan dengan para penganut keyakinan yang berbeda dan dengan sendirinya melihat perbedaan sebagai rahmat dan *kedua*, wajah Islam yang garang, mudah marah, tidak

toleran, dan eksklusif, yang menjadi antagonis bagi wajah Islam yang pertama.

Demikian juga pada kelompok kristen, terdapat juga beberapa kelompok. Mereka yang menerima pikiran-pikiran baru dalam ber-teologi ini disebut kelompok *modernist* dan atau liberal. Tetapi tidak semua gereja dan para pemimpin gereja, teolog dan umat Kristen menerima teori evolusi itu. Mereka menentang keras ajaran itu dengan membentengi dirinya dengan berbagai argumen Alkitabiah. Mereka yang menentang teori evolusi berargumen bahwa gereja harus loyal kepada "dasar-dasar iman Protestan", sebagaimana tertulis dalam Alkitab. Untuk membentengi diri dari terpaan modernisme dan teori evolusionisme itu, maka para pemimpin gereja dari berbagai kelompok konservatif dan evangelikal bersatu menerbitkan sebuah buku berjudul *The Fundamentals : A Testimony to the Truth*, yang terbit tahun 1910.

Masing-masing agama memiliki kelompok fundamental yang melihat kelompoknya yang paling benar. Latar belakang kelahiran fundamentalisme sebagaimana dibuat teolog dan ahli sejarah, George C. Marsden, yang mengatakan fundamentalisme adalah "*vangry evangelical*" adalah sangat tepat dalam konteks ini.

Disamping sesama agama terdapat sikap fundamentalis, ternyata harus diakui bahwa dalam kehidupan agama-agama yang beragam juga terdapat dilema yang serius yaitu ketika anggota kelompok agama berhubungan dengan kalangan di luar komunitasnya. Dalam komunitas agama, hampir semua agama memandang pihak lain lebih rendah, bahkan cenderung mendiskreditkan ketika berbicara komunitas di luar dirinya. Jika ini terjadi, maka ketegangan akan tercipta.

Negara Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, Islam pembawa kedamaian, nilai-nilai Islam sangat mendukung terciptanya kedamaian, maka selayaknyalah umat Islam yang rohmatan lil alamin menjadi penggerak kedamaian dan pengayom masyarakat. Disini terdapat kesadaran bahwa dalam keberagaman terdapat beragam keragaman seperti perbedaan dan keragaman faham agama.

Dalam mengejawantahkan keagamaannya, masing masing memiliki kultur, bahasa, adat, dan kewajiban yang sama-sama dimiliki dan perlu dihormati. Dengan keyakinan itulah akan mengantarkan kepada sikap keterbukaan, toleran, dan fleksibel dalam bertingkah.

Agama Islam yang datang ke Indonesia memang tidak dalam ruang yang hampa, datang langsung berinteraksi dengan budaya Indonesia, wajah Islam Indonesia seperti saat ini adalah cerminan dari hasil interaksi Islam dengan budaya Indonesia yang kemudian melahirkan Islam dengan tradisi NU dan Muhammadiyah.

Dengan demikian perlu diupayakan adanya peningkatan kesadaran multikultural pada bangsa kita, dan selanjutnya akan memupuk sikap moderasi beragama. Hal ini perlu dilakukan terhadap seluruh warga bangsa Indonesia baik oleh pemerintah, para tokoh-tokoh bangsa, dan para penyuluh agama yang memang ditugasi memberikan penyuluhan agama.

Bagaimana sikap moderat tersebut ditumbuhkan-kembangkan di masyarakat kita ? Setidaknya perlu menggunakan pendekatan agama dan pendekatan multikultural. Pendekatan agama didahulukan, karena keyakinan agama sangat dominan dalam kehidupan seseorang.

Sikap moderat dalam beragama berasal dari konsep "*tawasuth*", karena dalam segala aspek ajarannya Islam itu berkarakter moderat. Kita dianjurkan untuk tidak berlebihan dalam beragama atau bersikap ekstrim (*ghuluw*). Allah memerintahkan bersikap "*tawazun*" (seimbang). Dalam QS Ar-Rahman : "*Dan langit Allah tinggikan dan timbangan diletakkan. Agar kamu jangan melampaui timbangan (keseimbangan)*". (Darlis, 2017).

Dalam Risalah Jakarta disepakati bahwa konservatisme adalah sesuatu yang lumrah dalam beragama karena pemeluk agama berkewajiban memelihara keyakinan dan praktek keagamaannya.

Namun yang perlu untuk dihindarkan oleh setiap pemeluk agama adalah sikap yang terlalu berlebihan dalam beragama (*ultra-conservatism*). Dalam Islam, sikap tidak berlebihan tersebut berangkat dari konsep *al wasathiyah* yang ber-

makna seimbang.

Dalam konteks Indonesia, *al wasathiyah* meniscayakan keseimbangan antara beragama menurut teks Kitab Suci dengan penerapannya secara kontekstual. Pertimbangan konteks dalam beragama berangkat dari prinsip *maqashid* atau tujuan ditetapkannya hukum Islam (*Syari'ah*).

Moderasi Islam menjadi paham keagamaan keislaman yang mengejewantahkan ajaran Islam yang sangat esensial. Ajaran yang tidak hanya mementingkan hubungan baik kepada Allah, tapi juga yang tak kalah penting adalah hubungan baik kepada seluruh manusia. Bukan hanya pada saudara seiman tapi juga kepada saudara yang beda agama. (Kementrian Agama RI, 2015).

Moderasi ini mengedepankan sikap keterbukaan terhadap perbedaan yang ada yang diyakini sebagai sunnatullah dan rahmat bagi manusia. Selain itu, moderasi Islam tercerminkan dalam sikap yang tidak mudah untuk menyalahkan apalagi sampai pada pengkafiran terhadap orang atau kelompok yang berbeda pandangan.

Moderasi Islam lebih mengedepankan persaudaraan yang berlandaskan pada asas kemanusiaan, bukan hanya pada asas keimanan atau kebangsaan. Pemahaman seperti itu menemukan momentumnya dalam dunia Islam secara umum yang sedang dilanda krisis kemanusiaan dan Indonesia secara khusus yang juga masih mengisahkan sejumlah persoalan kemanusiaan akibat dari sikap yang kurang moderat dalam beragama. Konsekuensinya, perkembangan hukum Islam menjadi dinamis dan sesuai zaman (Fahrudin, 2019).

Pendekatan kultural juga dapat diterapkan. Kearifan lokal berasal dari dua kata : arif berarti cerdik, pandai dan bijaksana (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dengan awalan "ke" dan akhiran "an" maka berarti kearifan atau kebijaksanaan yang tumbuh yang berbeda antara satu dengan lainnya perlu diperhatikan.

Kearifan lokal bermakna kebijaksanaan atau nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kekayaan-kekayaan budaya lokal seperti tradisi, pepatah pepitih dan semboyan hidup'

juga perlu diperhatikan, sehingga menjadi modal dalam membangun keharmonisan. Dengan menggunakan pendekatan kearifan lokal atau *local wisdom*, maka beragam bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman dan wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas perlu juga diperhatikan.

Namun yang perlu diperhatikan, bahwa wacana kearifan lokal juga bersandingan dengan wacana perubahan, modernisasi dan relevansinya. Hal ini karena kearifan lokal terkait dengan ekspresi kebudayaan asli dalam konteks geografis dan kultural juga selalu dituntut untuk mampu merespon perubahan-perubahan masyarakat.

Untuk itu, upaya yang dilakukan sesuai pendapat Mas'ud, (2018) perlunya mengembangkan wawasan multikultural bagi segenap unsur dan lapisan masyarakat, serta peningkatan dialog dan kerja sama intern dan antarumat beragama dengan pemerintah dalam pembinaan kerukunan umat beragama.

Berbagai bentuk kearifan lokal moderasi beragama dapat menjadi contoh, sebagaimana pengalaman lokal Sumatera Barat : *Adat Basandi Syarak (ABS) Syarak Basandi Kitabullah (SBK)*, *Syarak Mangato Adat Memakai* (Ulama memfatwakan, kaum Adat yang menjalankan), *Raso jo Pareso* (ulama harus memiliki *raso* (rasa di hati) dan *pareso* (teliti di otak) agar bisa merasakan dan meneliti).

Disinilah dipertemukan komponen agama dan budaya dalam menyelesaikan masalah. Sehingga tanah Minang tidak ada lagi persoalan antara Islam dan adat. Kearifan Lokal inilah yang menangkal ketegangan dalam beragama.

PENUTUP

Simpulan

Dalam kehidupan multikultural diperlukan pemahaman dan kesadaran multibudaya yang menghargai perbedaan, kemajemukan dan sekaligus kemauan berinteraksi dengan siapapun secara adil.

Menghadapi keragaman, maka diperlukan sikap moderasi, bentuk moderasi ini bisa

berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Sikap moderasi berupa pengakuan atas keberadaan pihak lain, pemilikan sikap toleran, penghormatan atas perbedaan pendapat, dan tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan.

Diperlukan peran pemerintah, tokoh masyarakat, dan para penyuluh agama untuk mensosialisasikan, menumbuhkembangkan wawasan moderasi beragama terhadap masyarakat Indonesia untuk terwujudnya keharmonisan dan kedamaian.

Rekomendasi

Wawasan multibudaya bagi masyarakat Indonesia menjadi kebutuhan penting dalam membangun keharmonisan bangsa, sehingga perlu dilakukan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan terhadap masyarakat.

Moderasi beragama perlu ditumbuhkan melalui sarasehan, pengajian, maupun dialog kebangsaan, sehingga menjadi sikap bangsa Indonesia. Pemerintah, melalui Kementerian Agama, Balai Diklat Keagamaan bersama penyuluh agama dapat menjadi penggerak gerakan moderasi beragama ini. [α]

DAFTAR PUSTAKA

- Pengembangan Kompetensi Penyuluh Agama pada Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama*. Tangerang: Young Progressive Muslim.
- Darlis. (2017). Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural. *Rausyan Fikr*, Vol. 13 No. 2 Desember, 225-255.
- Fahrudin. (2019). Pentingnya Moderasi Beragama bagi Penyuluh Agama. *Republika*.
- Kementrian Agama RI. (2015). *Naskah Akademik Bagi Penyuluh Agama Puslitbang Kehidupan Keagamaan*. Jakarta.
- Mas'ud, A. (2018). *Strategi Moderasi Antarumat Beragama*. Jakarta: Kompas.
- Nugraha. (2008). *Wawasan Multikultural*. Bandung: BDK Bandung.
- Rakhmat, C. (2008). *Paradigma Konseling Berbasis Budaya: Metateori yang membumikan Konseling dalam konteks Budaya. Pidato pengukuhan Guru Besar pada FIP UPI*. Bandung : UPI.
- Schwartz, S. (2007). *Dua wajah Islam: moderatisme vs fundamentalisme dalam wacana global*. Jakarta: Belantika.
- Shihab, A. (1999). *Islam Inklusif*. Bandung: Mizan.